

BAB II

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

2.1 Gambaran Umum Pemerintah Kota Tanjungpinang

Gambaran umum Pemerintah kota Tanjungpinang ini dikutip dari website resmi pemerintah kota Tanjungpinang yakni *tanjungpinangkota.go.id* dan juga bersumber dari data yang diperoleh dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tanjungpinang. Berikut dilampirkan sejarah dan perkembangan pemerintah kota Tanjungpinang, visi misi, lambang, moto dan slogan Kota Tanjungpinang, struktur dan tupoksi tim *city branding* yakni Bidang Infrestruktur Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Tanjungpinang.

2.1.1 Sejarah dan Perkembangan Pemerintah Kota Tanjungpinang

Berdasarkan naskah Sulalatus Salatin (dikutip dari website <http://tanjungpinangkota.go.id/> yang diakses pada 19 Januari 2017) kawasan kota Tanjungpinang merupakan bagian dari Kerajaan Melayu, setelah jatuhnya Malaka ke tangan Portugal, Sultan Mahmud Syah menjadikan kawasan ini sebagai pusat pemerintahan Kesultanan Malaka. Kemudian menjadi pusat pemerintahan Kesultanan Johor, sebelum diambil alih oleh Belanda

terutama setelah Belanda menundukan perlawanan Raja Haji Fisabilillah tahun 1784 di Pulau Penyengat.

Pada masa kolonial Belanda, Tanjungpinang ditingkatkan statusnya menjadi pusat pemerintahan dari *Residentie Riouw* pemerintah Hindia-Belanda. Kemudian di awal kemerdekaan Indonesia, menjadi ibu kota Kabupaten Kepulauan Riau. Setelah menjadi Kota Administratif - Kabupaten Kepulauan Riau hingga tahun 2000, berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2001, pada tanggal 21 Juni 2001, statusnya menjadi Kota Tanjungpinang. Pusat pemerintahan yang semula berada di pusat Kota Tanjungpinang di pemukiman padat penduduk kemudian dipindahkan ke Senggarang (bagian utara kota) sebagai pusat pemerintahan. Hal ini ditujukan untuk mengimbangi kesenjangan pembangunan dan kepadatan penduduk yang selama ini berpusat di kota lama (bagian barat kota).

2.1.2 Pemerintahan

Pada tahun 2002 terpilih Dra. Hj. Suryatati A. Manan sebagai Walikota pertama melalui pemilihan oleh DPRD Kota Tanjungpinang. Pada tahun 2007 Suryatati terpilih kembali untuk menjadi Walikota Tanjungpinang. Kemudian pada tahun 2012, terpilih H. Lis Darmansyah sebagai Walikota periode 2012-2017.

Wilayah administrasi pemerintahan Kota Tanjungpinang dibagi menjadi 4 kecamatan. Kecamatan-kecamatan di Kota Tanjungpinang adalah Tanjungpinang Barat, Tanjungpinang Kota, Bukit Bestari, dan Tanjungpinang Timur. Dari 4 kecamatan tersebut dibagi menjadi 18 Kelurahan yang ada di kota Tanjungpinang.

Kepulauan Riau memiliki letak geografis yang strategis antara Laut Cina Selatan, Selat Malaka dan Selat Karimata. Dengan batas wilayah, Utara dengan Vietman dan Kamboja. Selatan dengan provinsi Bangka Belitung dan Jambi. Barat dengan Singapura, Malaysia, dan Provinsi Riau. Timur dengan Malaysia, Brunei dan Provinsi Kalimantan Barat. (dikutip dari website <http://tanjungpinangkota.go.id/> yang diakses pada 20 Januari 2017)

2.1.3 Kependudukan

Suku Melayu merupakan penduduk asli dan kelompok suku bangsa yang dominan di Tanjungpinang, selain itu terdapat juga suku Bugis, Banjar dan Tionghoa yang sudah ratusan tahun berbaur dengan suku Melayu dan menjadi penduduk tetap semenjak zaman Kesultanan Johor Riau dan Residentie Riouw. Suku Bugis awalnya menetap di Kampung Bugis dan suku Tionghoa banyak menempati kota tua dan bakar batu.

Suku Jawa mulai ramai mendatangi Tanjungpinang pada tahun 1960, pemukiman awal orang Jawa terletak di Kampung Jawa.

Menjelang tahun 2000 hingga sekarang orang Sunda, Minangkabau dan Batak menjadi suku pendatang yang paling banyak mendatangi Tanjungpinang. Suku Sunda, Minang, dan Batak datang dengan tujuan mengubah nasib melalui berbagai jenis pekerjaan di berbagai bidang.

Bahasa yang digunakan di Tanjungpinang adalah bahasa Melayu. Bahasa Melayu di kota ini sama dengan bahasa melayu yang digunakan di Singapura, Johor, Pahang, Selangor, Malaka hingga Kuala Lumpur, karena memang sejak zaman pemerintahan kesultanan Riau Lingga dahulu Tanjungpinang sudah menjadi pusat budaya Melayu bersama Singapura. Selain itu bahasa Tiochiu dan Hokkien juga banyak digunakan oleh suku Tionghoa di Kota Tanjungpinang. (dikutip dari website <http://tanjungpinangkota.go.id/> yang diakses pada 20 Januari 2017)

2.1.4 Perekonomian dan Pariwisata

Pulau Penyengat merupakan salah satu kawasan wisata di Kota Tanjungpinang. Pulau seluas 3,5 km² ini berada di sebelah barat Kota Tanjungpinang dan dapat ditempuh 15 menit dengan transportasi laut. Pada pulau ini terdapat banyak peninggalan lama dengan wujud bangunan dan makam yang telah dijadikan situs

cagar budaya. Selain itu juga dijumpai kelenteng atau vihara di kawasan Kampung Bugis yang sekaligus menjadi kawasan wisata religi.

Gambar 2.1
Masjid Raya Sultan Riau Penyengat



Sumber: Observasi, 2016

Pariwisata di kota Tanjungpinang ditunjang oleh adanya 13 hotel bintang, 43 hotel non bintang, 34 rumah makan dan pusat-pusat belanja yang terdiri dari 13 supermarket serta pertokoan yang tersebar di wilayah kota. Sementara jumlah kunjungan wisatawan didominasi dari negara Singapura, Malaysia dan Belanda. Kota ini juga menawarkan sajian kuliner aneka hidangan laut, dan masakan Cina.

Pada tahun 2001, sektor perdagangan, hotel, dan restoran memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam membangun perekonomian Kota Tanjungpinang yaitu sebesar 35,54%

kemudian diikuti oleh sektor industri pengolahan 15,37%, sektor bangunan 13,29%, sektor jasa-jasa 12,51%, dan sektor pengangkutan dan komunikasi 10,82%. Sedangkan sektor lainnya meliputi sektor listrik, gas, dan air bersih, keuangan, pertanian, dan sektor pertambangan dan penggalan sebesar 12,47%.

2.2 Visi Misi Kota Tanjungpinang

Visi & Misi Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Periode 2013-2018

VISI

Tanjungpinang Yang Sejahtera, Berakhlak Mulia, Dan Berwawasan Lingkungan Dengan Pemerintahan Yang Bersih, Transparan, Akuntabel Serta Melayani.

MISI

1. Meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat modal sosial dengan menjamin kemudahan akses terhadap fasilitas kesehatan dan pendidikan yang berkualitas.
2. Meningkatkan kesejahteraan melalui pemberdayaan ekonomi lokal yang berbasis ekonomi kerakyatan.
3. Mengembangkan kehidupan yang agamis dan berbudaya serta demokratis dalam bingkai Pancasila. Mewujudkan kehidupan yang agamis dan berbudaya, demokratis serta berkesetaraan gender dalam bingkai Pancasila.
4. Membangun pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel yang berorientasi pada pelayanan publik. Meningkatkan kualitas dan kuantitas

sumber daya aparatur untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel yang berorientasi pada pelayanan publik.

5. Menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi dunia usaha dengan mengutamakan keunggulan komparatif Kota Tanjungpinang.
6. Mengembangkan potensi pariwisata dan budaya daerah.
7. Mengembangkan dan meningkatkan sumber daya pemuda dan olah raga.
8. Melaksanakan pembangunan yang ramah lingkungan dengan penataan ruang dan pemanfaatan lahan yang efektif, serta pelestarian lingkungan hidup dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

2.3 Lambang, Moto, dan Slogan

2.3.1 Lambang

Gambar 2.2

Lambang Pemerintah Kota Tanjungpinang



Sumber: website <http://tanjungpinangkota.go.id/>, 2017

Makna Lambang:

1. Bentuk Perisai Bersudut Lima berwarna hijau pucuk daun pisang berbingkai coklat melambangkan Kota Tanjungpinang yang berdasarkan Pancasila.
2. Bintang berwarna putih adalah melambangkan Keagungan dan Kesucian Nur (Cahaya) Ketuhanan yang menerangi sendi-sendi kehidupan Kota Tanjungpinang.
3. Payung berwarna kuning adalah melambangkan kebesaran Melayu Kepulauan Riau dan melindungi kehidupan masyarakat, bertulang dua belas warna merah adalah merupakan cerminan dari nilai-nilai kehidupan beragama, pemerintahan dan masyarakat sebagai termaktub dalam pasal-pasal pada Gurindam 12 karya Raja Ali Haji.
4. Padi dan Kapas, padi berwarna kuning dan kapas berwarna putih dengan kelopak hijau tua adalah sebagai lambang kemakmuran dan kesejahteraan bersimpul tali satu kesatuan berjumlah 45 (empat puluh lima) garis dengan padi berjumlah 17 (tujuh belas) dan kapas berjumlah 10 (sepuluh) yang merupakan Hari Jadi Kota Otonom Tanjungpinang.
5. Selebar daun sirih berwarna hijau tua beruas enam adalah Keluhuran dan Kejujuran sebagai simbol adat istiadat dan budaya melayu yang bersendikan kepada nilai-nilai keimanan.
6. Kelopak bunga 4 (empat) buah berwarna kuning melambangkan keagungan dan kebangsawanan dan disangga kelopak kecil 18

(delapan belas) buah berwarna merah melambangkan keberanian, mengartikan Kota Tanjungpinang sebagai kota yang indah, berbudaya dan merupakan gambaran Kota Tanjungpinang terdiri dari 4 (empat) kecamatan dan 18 (delapan belas) kelurahan.

7. Gelombang laut berwarna biru muda ada lima adalah keluhuran Pancasila sebagai Dasar Negara landasan dalam pemerintah.
8. Keris lekuk lima berwarna kuning emas dan berhulu warna coklat berbentuk kepala burung serindit adalah melambangkan Agama sebagai tiang utama, jiwa kejuangan dan patriotisme rakyat serta kebijaksanaan untuk mengamankan negeri.

2.3.2 Moto dan Slogan

Motto Kota Tanjungpinang adalah "**JUJUR BERTUTUR BIJAK BERTINDAK**" yang tertulis pada pita berwarna coklat mengandung makna amanah dan bijaksana dalam menyelenggarakan pemerintah dan sebagai pelayan masyarakat dapat memberikan kekekalan dan keabadian yang nyata bagi masyarakat Kota Tanjungpinang.

Slogan Kota Tanjungpinang adalah "**GURINDAM**" yang merupakan singkatan Gigih, Unggul, Rapi, Indah, Nyaman, Damai, Aman dan Manusiawi yang mengandung makna Kota Tanjungpinang ditata secara terpadu untuk menciptakan lingkungan yang indah, hijau berbunga, bersih, memiliki daya pemikat bagi wisatawan yang merupakan cerminan dari pemerintah yang berwibawa, bebas dari penyalahgunaan wewenang

yang merugikan masyarakat dan bertindak berlandaskan adat istiadat, budaya, moralitas dan kemanusiaan.

Namun, pada 29 Juli 2007 di Taman Ismai Marzuki, Jakarta di deklarasikan slogan Tanjungpinang yakni **“Kota Gurindam Negeri Pantun”**. Kata Gurindam yang sesungguhnya yakni sebuah karya sastra dalam spesifikasi kata Gurindam disini mengandung arti Gurindam 12 karya Raja Ali Haji yang penuh dengan makna serta nasehat. Pemerintah mengusung Gurindam sebagai slogan kota bermaksud untuk Kota Tanjungpinang dalam bermasyarakat dapat mengaplikasikan isi dari Gurindam 12. Dan kata Negeri Pantun yang di usung sebagai slogan Kota Tanjungpinang yakni karena pantun dikenal sebagai satu diantara sastra lisan yang berkembang pada setiap zaman dalam masyarakat melayu termasuk di Tanjungpinang. Pantun mengajarkan orang bersopan santun, bertata krama, beretika, bermasyarakat, dan memaknai rasa kemanusiaan dan beragama serta mencapai kemajuan dalam kehidupan. Pantun telah menjadi corak, citra, dan kreativitas penting bagi orang melayu. Berpantun dalam setiap kesempatan menjadi ciri khas, bahkan inti yang tidak boleh ditinggalkan. (dikutip dari website <http://tanjungpinangkota.go.id/> yang diakses pada 20 Januari 2017)

2.4 Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan dan Pembangunan

Kota Tanjungpinang

Pada bagian ini ingin memaparkan tentang tim *city branding* Pemerintah Kota Tanjungpinang yakni pada Bidang Perencanaan dan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur. Berikut dilampirkan tugas, pokok, fungsi dan struktur Bappeda Kota Tanjungpinang. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah;
- b. Pengoordinasian, penyusunan, dan perencanaan pembangunan daerah;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

2.4.1 Bidang Perencanaan Infrastruktur, Tata Ruang dan Lingkungan

Hidup

Bidang Perencanaan Infrastruktur, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang perencanaan infrastruktur, tata ruang dan lingkungan hidup. Bidang Perencanaan Infrastruktur, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan rencana dan program kerja di bidang Infrastruktur, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup;

- b. Penyusunan perumusan kebijakan di bidang Infrastruktur, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan koordinasi dalam perencanaan Infrastruktur Perkotaan, Sarana dan Prasarana Pemukiman, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup;
- d. Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan di bidang Infrastruktur Perkotaan, Sarana dan Prasarana Pemukiman, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

2.4.2 Sub Bidang Infrastruktur Perkotaan, Sarana dan Prasarana Pemukiman

Sub Bidang Infrastruktur Perkotaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Perencanaan Infrastruktur Perkotaan, Sarana dan Prasarana Pemukiman di bidang Perencanaan Infrastruktur, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup. Sub Bidang Infrastruktur Perkotaan, Sarana dan Prasarana Pemukiman menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja di bidang Infrastruktur Perkotaan, Sarana dan Prasarana Pemukiman;
- b. Pengumpulan dan analisa data Infrastruktur Perkotaan, Sarana dan Prasarana Pemukiman;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Infrastruktur Perkotaan, Sarana dan Prasarana Pemukiman;
- d. Pelaksanaan pengoordinasian dalam perencanaan pembangunan di bidang Infrastruktur Perkotaan, Sarana dan Prasarana Pemukiman;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Infrastruktur Perkotaan, Sarana dan Prasarana Pemukiman; dan

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

2.4.3 Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup

Sub Bidang Sarana Prasarana Pemukiman dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Perencanaan Infrastruktur, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup di bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup. Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja di bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup;
- b. Pengumpulan dan analisa data Tata Ruang dan Lingkungan Hidup;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup;
- d. Pelaksanaan pengoordinasian dalam perencanaan pembangunan di bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

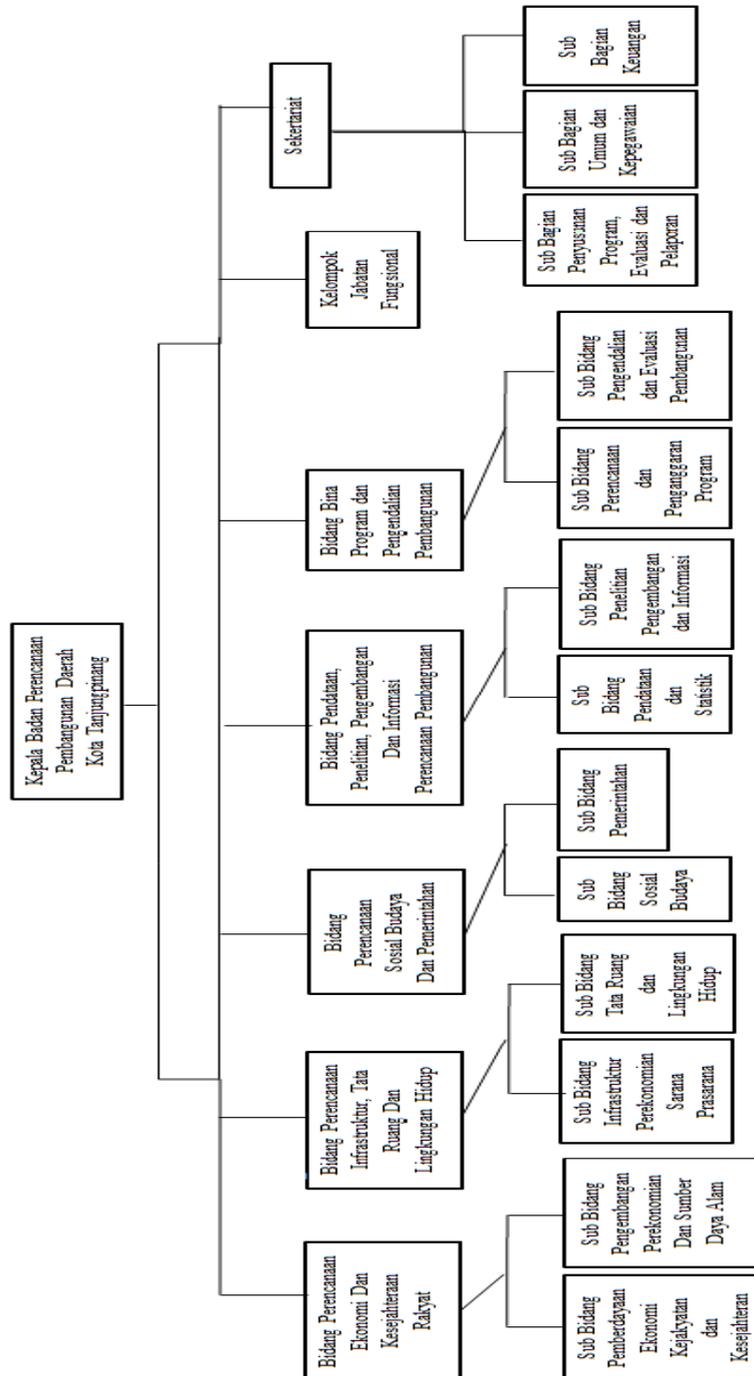
2.5 Struktur Organisasi Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota Tanjungpinang

(1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri atas:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Perencanaan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat, membawahkan:
 1. Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Kesejahteraan; dan
 2. Sub Bidang Pengembangan Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
 - d. Bidang Perencanaan Infrastruktur, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup, membawahkan:
 1. Sub Bidang Infrastruktur Perkotaan Sarana Dan Prasarana Permukiman; dan
 2. Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup
 - e. Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan, membawahkan:
 1. Sub Bidang Sosial Budaya; dan
 2. Sub Bidang Pemerintahan.
 - f. Bidang Pendataan, Penelitian, Pengembangan dan Informasi Perencanaan Pembangunan, membawahkan:
 1. Sub Bidang Pendataan dan Statistik; dan
 2. Sub Bidang Penelitian Pengembangan dan Informasi Perencanaan Pembangunan.
 - g. Bidang Bina Program dan Pengendalian Pembangunan, membawahkan:
 1. Sub Bidang Perencanaan dan Penganggaran Program; dan
 2. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Gambar 2.3
Bagan susunan organisasi Bappeda Kota Tanjungpinang



Sumber: Bappeda Kota Tanjungpinang, 2016